



SEJAK FEBRUARI DITELUSURI TERSANGKA KORUPSI BANSOS BERAS MASIH DITUTUP-TUTUPI

RENCANA PENYALURAN BANTUAN SOSIAL BERAS (2023)

TAHAP
I/MARET
210

TAHAP
II/APRIL
210

TAHAP
III/MEI
210

TOTAL
630

Sumber :
Databoks
(ton)

Dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) beras untuk Program Keluarga Harapan (PKH) masih menyisakan banyak tanda tanya. Bahkan, soal tersangkanya pun hingga kini masih teka-teki. Padahal, pengusutan telah dilakukan sejak Februari 2023. Dikatakan telah ada ada tersangka yang ditetapkan, namun hingga kini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum juga mengumumkan secara resmi. Terbaru, komisi anti-rasuah menyelesaikan pemeriksaan Plt Direktur Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI Faisal. Data yang ditelusuri salah satunya adalah laporan para pendamping tahun 2020 sampai dengan 2021 pada Kementerian Sosial (Kemensos). Bahkan, kantor Kemensos yang saat ini dinakhodai Tri Rismaharini telah digeledah Mei lalu. Sejumlah dokumen dan gawai pun sudah dibawa KPK. Lamban, begitu kalangan pengamat menilai perjalanan kasus ini. Ada apa?

(Baca Hal 11)

**Government (Hal.2)
Bermodal Paspor,
WNA Bisa
Beli Properti
di RI**



Bermodal Paspor, WNA Bisa Beli Properti di RI

JAKARTA-Pemerintah telah mengeluarkan aturan untuk mempermudah warga negara asing (WNA) untuk memiliki aset atau rumah tinggal di Indonesia. Kini, syaratnya hanya membutuhkan paspor sebagai bukti sah identitas WNA. Menurut hitungan pelaku usaha, potensi pasaranya minimal Rp20 triliun dengan asumsi 100.000 ekspatriat melakukan pembelian.

Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN Suyus Windayana menerangkan, aturan itu merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. Disini, syaratnya WNA cukup memiliki dokumen keimigrasian untuk bisa membeli aset di dalam negeri.

"Sehingga dengan ketentuan ini, cukup paspor atau Visa orang asing dapat memiliki properti di Indonesia," kata dia dalam Sosialisasi Regulasi Kepemilikan Hunian untuk Orang Asing, di Hotel Sheraton, Jakarta, Kamis (3/8/2023).

Suyus mengatakan, aturan beli rumah ini berbeda dengan sebelumnya. Yakni, WNA perlu lebih dulu memiliki Kartu Identitas Tinggal Sementara (KITAS) atau Kartu Identitas Tinggal Tetap (KITAP). "Jadi ini agak berbeda dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya kita meminta KITAS dan KITAP juga, jadi sekarang untuk kepemilikan orang asing cukup (paspor atau visa), KITAS dan KITAPnya nanti diberikan setelah orang asing tersebut mendapatkan atau membeli properti yang ada di Indonesia, jadi ini posisinya dibalik," jelasnya.

Dia menegaskan, aturan ini sudah disetujui oleh Direktorat Jenderal Keimigrasian Kemendikhum. Artinya, ada syarat yang lebih mudah untuk WNA memiliki aset di Indonesia. Aturan tersebut juga mempermudah WNA untuk memiliki aset rumah susun. Kali ini, orang asing bisa punya rusun yang berdiri di atas tanah dengan Hak Guna Bangunan (HGB). Padahal sebelumnya, yang boleh dibeli hanya yang memiliki izin hak pakai.

"Pengaturan sebelumnya orang asing hanya dapat memiliki rumah susun di atas hak pakai, hal ini tentunya jadi ditunggu oleh para pegiat properti karena pada umumnya rusun dibangun (di atas) tanah HGB," paparnya.

Diberitakan sebelumnya, Gubernur Bali Wayan Koster mengungkapkan banyak warga negara asing (WNA) yang sengaja menikahi warga lokal untuk menguasai aset di Bali. Wayan mengatakan modus penguasaan aset di Bali seperti ini harus segera ditangani serius. Sebab



(ilustrasi) Cukup dengan paspor atau visa Warga Negara Asing (WNA) bisa membeli rumah di Indonesia. (dok)

akan membahayakan Bali di masa depan.

"Saya perlu mengingatkan ini dan kita harus mengurus ini dengan serius, penduduk lokal Bali ini dimanfaatkan oleh warga negara asing (dengan cara) kawin. Untuk mempermudah pengalihan kepentingannya, yaitu penguasaan aset dan ini berbahaya buat Bali di masa yang akan datang," ujarnya. "(WNA) kawin sebentar cerai, kawin sebentar cerai, akhirnya kita akan menghadapi masalah besar ke depannya. Tanahnya sudah dimiliki jadinya (oleh WNA)," ujarnya Juni lalu.

Batam, Bali dan Jakarta Jadi Favorit

Wakil Ketua Umum DPP REI Bidang Hubungan Luar Negeri, Rusmin Lawin, mengatakan regulasi tersebut merupakan dukungan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mendorong penyerapan produk hunian untuk WNA. "Dulu kita hitung potensi masuknya minimal bisa Rp20 triliun dengan asumsi 100.000 ekspatriat [pembelian]. Misal dari 100.000 orang itu beli unit dengan

batas harga Rp2 miliar minimal," kata Rusmin kepada wartawan, Kamis (3/8/2023).

Dia menuturkan, ada 3 wilayah di Indonesia yang menjadi sasaran WNA untuk pembelian properti yakni Batam, Bali, dan Jakarta. Namun, selama ini masih ada kendala dalam implementasi penjualan. Beberapa kendala di antaranya terkait dengan aturan pemerintah daerah yang masih mewajibkan pembelian properti dengan Kartu Izin Tinggal Tetap/ Terbatas (KITAS/KITAP). Namun, lewat terbitnya UU Cipta Kerja, aturan ini seharusnya tak lagi diberlakukan.

"Padahal, kita kalau buka properti orang asing kita bukan menjual negara, kita menjual potensi ekonomi negara. Bayangkan ada berapa potensi pembukaan lapangan kerja," ujarnya.

Lebih lanjut, Rusmin menerangkan bahwa saat ini merupakan waktu yang tepat untuk Indonesia mengencangkan pembelian properti bagi WNA di Indonesia. Pasalnya, negara tetangga seperti Vietnam dan Thailand pun semakin agresif.

Di samping itu, dia memberikan contoh batasan pembelian properti WNA di negara lain, Singapura memberikan batasan kepemilikan properti WNA sebesar 30 persen. Sementara, Malaysia dibatasi 5 persen. "Kita paling tidak lebih dari 5 persen," tuturnya.

Sebagaimana diketahui, setelah UU Cipta Kerja terbit, ada kemudahan dalam hal kepemilikan hunian untuk orang asing sehingga orang asing cukup melampirkan dokumen keimigrasian berupa visa, paspor, atau izin tinggal. Kedua, di aturan sebelumnya mengatur kepemilikan hunian oleh warga asing di Indonesia hanya berlaku pada properti berstatus tanah hak pakai, sedangkan setelah adanya UU Cipta Kerja, diberikan hak kepemilikan satuan rumah susun bagi rusun yang berdiri di atas hak guna bangunan (HGB).

Ketiga, yaitu ketentuan terkait harga. Sebelum UU Cipta Kerja, harga lebih tinggi, sedangkan dengan adanya penyesuaian pada daftar harga minimal pembelian tunggal atau satuan rusun oleh orang asing dengan daya beli saat ini, sebagian besar menjadi lebih rendah.

Berdasarkan data terbaru Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) per Mei 2023, kepemilikan properti pada periode 2017-2023 mencapai 131 properti. Pada 2017-2020, kepemilikan properti oleh WNA hanya mencapai 52 properti. Namun, setelah UU Cipta Kerja ditetapkan atau periode 2020-2023, ada peningkatan sebanyak 52 persen atau sebanyak 79 bidang. Setidaknya ada 36 sertifikat kepemilikan properti asing di Batam yang telah diserahkan pemerintah. (wid,rls,lip,ist/dya))

ATURAN HARGA MINIMAL RUMAH BISA DIBELI WNA



DPR Persilakan Revisi UU Peradilan Militer



JAKARTA -- Pemerintah melalui Menko Polhukam Mahfud MD mempertimbangkan wacana untuk merevisi UU Peradilan Militer. DPR RI mempersilakan saja revisi itu dilakukan, bila memang dibutuhkan. Diketahui, usul revisi ini muncul setelah adanya polemik penanganan kasus dugaan suap yang menjerat Kepala Basarnas Marsekal Madya Henri Alfandi dan Koorsmin Kabasarnas Letkol Adm Afri Budi Cahyanto.

Anggota DPR RI, Dave Akbarshah Fikarno Laksono mengatakan, Komisi I sebenarnya menanti saja kalau memang pemerintah sudah menilai UU Peradilan Militer perlu direvisi. Serta, jika pemerintah sudah mendalami pasal-pasal yang mau dilakukan revisi. "Kalau memang pemerintah sudah menilai itu perlu direvisi dan sudah tahu pasal-pasal yang mau direvisi ayo, silakan bahas ke DPR," kata Dave, Kamis (3/8/2023).

Untuk merevisi ada proses panjang yang perlu dilalui. Mulai dari Mabes TNI melalui Kementerian Pertahanan, lalu dikirim ke Kemenkumham, dikirim ke Sekretariat Negara. Setelah itu, barulah Supres dikirimkan ke DPR. "Baru kita mulai pembahasan," ujar Dave.

Terkait hal-hal yang perlu direvisi, ia menekankan, penilaian tidak bisa dilakukan dari satu sisi saja. Jadi, jika nanti revisi benar-benar akan dilaksanakan perlu dilihat masalah-masalah yang ada dari banyak sisi. "Kalau kita bicara UU Peradilan Militer itu luas meliputi segala macam, baik itu pidana, mungkin masuk TUN juga, supaya harus dipertimbangkan," kata Dave.

Ketua DPP Partai Golkar ini turut mengomentari polemik KPK-TNI dalam kasus suap Kabasarnas yang

dirasa mendorong wacana revisi UU Peradilan Militer. Ia melihat, polemik itu memang bisa jadi momentum perbaikan.

Meski begitu, ia menegaskan, Komisi I DPR RI sebenarnya mengembalikan itu semua kepada pemerintah. Menurut Dave, DPR RI siap membahas jika pemerintah menilai UU Peradilan Militer memang sudah waktunya direvisi. "Jadi, tidak ada penolakan, kita siap membahas karena nanti kita indikasi permasalahannya apa saja," ujar Dave.

Mahfud Md Sepakat

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD sepakat dengan usulan revisi Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. "Saya sependapat itu perlu segera dibahas," kata Mahfud di Rumah Dinas Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (2/8/2023).

Mahfud menegaskan bakal mempertimbangkan usulan revisi UU Peradilan Militer tersebut. Menurutnya, saat ini revisi UU Peradilan Militer memang sudah ada di daftar program legislasi nasional (prolegnas) jangka panjang DPR RI. "Ya, nanti kita agendakan, kan sudah ada di prolegnas ya. Di prolegnas jangka panjang. Nanti kita bisa bicarakan, kapan prioritas dimasukkan," kata dia.

Sementara itu, Mahfud mengatakan penanganan dugaan kasus suap yang menyeret Henri Alfandi dan Afri saat ini lebih tepat di pengadilan militer. Sebab, UU Peradilan Militer masih berlaku saat ini. Ia pun percaya Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI dan pengadilan militer dapat objektif menangani kasus tersebut. "Saya percaya. Nyatanya kita koordinasi

sehari langsung [ditetapkan] tersangka," kata dia.

Elemen masyarakat sipil mengusulkan supaya pemerintah dan DPR segera merevisi UU Peradilan Militer usai dugaan kasus suap di Basarnas yang melibatkan prajurit TNI aktif. Penanganan kasus yang mulanya ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu juga sempat menimbulkan kegaduhan. Puspom TNI tak terima karena KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) dan penetapan tersangka tanpa koordinasi.

Ahli hukum pidana dari Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Chairul Huda menilai kasus dugaan korupsi Basarnas seharusnya menjadi momentum bagi Pemerintah dan DPR merevisi UU Peradilan Militer. Ia mengatakan upaya revisi undang-undang itu sudah sejak awal reformasi, tetapi hingga kini belum juga berhasil. "Karena TNI belum juga mau bersepakat mengejawantahkan Pasal 65 ayat (2) UU Nomor 34 tahun 2004," kata Huda.

KPK-TNI Lakukan Joint Investigation

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Puspom TNI sepakat untuk melakukan penyidikan bersama atau joint investigation terkait kasus suap di Basarnas. Komisi anti-rasuah juga telah menyerahkan satu unit mobil ke ke Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI. Mobil itu sempat diamankan KPK saat melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terkait kasus dugaan suap Kepala Basarnas Marsdya Henri Alfandi.

"Tim penyidik juga menyerahkan satu unit mobil yang diamankan pada saat kegiatan tangkap tangan," kata

Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (3/8/2023).

Ali menyebut KPK telah memberikan fasilitas pemeriksaan tiga tersangka pemberi suap dalam perkara ini pada Selasa (2/8). Pemeriksaan itu dilakukan untuk melengkapi berkas perkara Kepala Basarnas Henri Alfandi (HA) dan Koorsmin Kabasarnas Letkol Afri yang ditangani Puspom.

"KPK telah selesai memfasilitasi pemeriksaan yang dilakukan Tim Penyidik Puspom TNI untuk memeriksa tiga orang tersangka KPK yaitu MG, MR dan RA sebagai saksi untuk melengkapi berkas perkara Tersangka HA dkk yang ditangani Mabes TNI," ucapnya.

Sebagai informasi, Henri Alfandi ditetapkan sebagai tersangka penerima suap proyek pengadaan barang dan jasa di Basarnas. Kasus yang menjerat Henri dan Afri ditangani oleh Puspom TNI. (wid,rls,ant,ist/dya)

LANDASAN HUKUM PENANGANAN KORUPSI BASARNAS

Undang-Undang KPK

PASAL 11
KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang melibatkan penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara.

PASAL 42
KPK berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum.

Undang-Undang TNI

PASAL 65 AYAT 2
Prajurit tunduk pada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal hukum pelanggaran pidana umum yang diatur dengan undang-undang.

PASAL 74
Ketentuan dalam Pasal 65 berlaku pada saat Undang-Undang tentang Peradilan Militer yang baru diberlakukan



Ombudsmen RI Ungkap Berbagai Pemmasalahan Pupuk Bersubsidi

JAKARTA – Menyikapi pemmasalahan pupuk bersubsidi yang masih menjadi keluhan para petani, Ombudsman RI menggelar workshop bertema 'Transformasi Kebijakan Subsidi Pupuk' bersama Kementerian Pertanian di Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (3/7/2023).

Hasilnya Ombudsman RI menemukan sejumlah permasalahan dalam kebijakan program pupuk bersubsidi yang melibatkan Kementerian Pertanian (Kementan) dan PT Pupuk Indonesia. Ada 5 poin utama yang diungkap. Selain itu juga ada Ombudsme WI Jati, sering mendapatkan keluhan masyarakat terkait kelangkaan pupuk bersubsidi

"Permasalahan pokok dalam kebijakan pupuk bersubsidi berdasarkan hasil kajian dan investigasi," kata Wakil Ketua Ombudsman RI Bobby Hamzar Rafinus saat memberi sambutan dalam workshop "Transformasi Kebijakan Pupuk Bersubsidi," di Babakanmadang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dikutip dari antara, Kamis (3/8/2023).

Ombudsman RI mencatat lima poin permasalahan pokok dalam kebijakan program pupuk bersubsidi. Pertama, yaitu mengenai tujuan kebijakan pupuk bersubsidi yang dinilai belum jelas dan tepat tujuan.

Kedua, kata dia lagi, permasalahan kriteria petani penerima pupuk bersubsidi yang dinilai belum jelas dan tepat sasaran. Ketiga, pendataan yang tidak kunjung menghadirkan data yang akurat.

Keempat, permasalahan penyaluran yang kerap memunculkan isu tidak tepat sasaran, kurang dan langka. Kelima, permasalahan desain perencanaan anggaran yang tidak merata pada setiap dukungan program pupuk bersubsidi.

Bobby mengatakan, Ombudsman RI memberikan perhatian secara khusus guna mendorong perbaikan dan transformasi dalam kebijakan pupuk bersubsidi, salah satunya melalui workshop tersebut.

"Hal ini dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan pemerintah terhadap publik di sektor pertanian," kata Bobby.

Menurut dia, kegiatan workshop itu akan menjadi momentum yang penting bagi instansi-instansi yang terlibat untuk mendorong perbaikan dan transformasi kebijakan pupuk bersubsidi.

"Tentunya menjadi harapan bagi kita semua, semoga tata kelola pupuk bersubsidi semakin lebih baik ke depannya dan petani kecil di Indonesia mendapat perlindungan atas hak-haknya dalam memperoleh pupuk bersubsidi," ujarnya pula.

Bobby juga mengatakan bahwa Ombudsman melakukan pengawasan terhadap distribusi pupuk bersubsidi. Menurutnya, pengawasan itu



Wakil Ketua Ombudsman RI, Bobby Hamzar Rafinus (Rizky/detikcom)

dilakukan hingga tingkat kota/kabupaten.

"Karena peredaran pupuk bersubsidi ini melibatkan berbagai pihak. Tidak hanya BUMN, tapi juga para masyarakat yang masuk ke dalam lini perdagangan distribusinya," kata Bobby.

Dia menandakan bahwa pihaknya terus menampung masukan dan aduan dari masyarakat terkait peredaran pupuk bersubsidi. Hingga kini, kata dia, Ombudsman masih terus menerima laporan terkait kelangkaan pupuk subsidi.

"Kami dalam beberapa kesempatan masih menerima laporan dari masyarakat terkait dengan kelangkaan yang terjadi. Melalui peredaran pupuk bersubsidi ini, mudah-mudahan kita akan terus mendapat data semakin akurat," ucapnya.

Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra, mengatakan pengawasan peredaran pupuk subsidi dilakukan melalui dua kegiatan. Yaitu percepatan administrasi dan mitigasi kelangkaan. "Pertama 2021 kami melakukan percepatan administrasi dengan memetakan semua persoalan pupuk bersubsidi dari hulu ke hilir. Kedua kami melakukan mitigasi atas kelangkaan pupuk bersubsidi," ujarnya.

Dia menyebut Ombudsman banyak menerima laporan terkait kelangkaan pupuk bersubsidi dari para petani. Namun karena beberapa persyaratan belum terpenuhi, pihaknya tetap perlu melakukan investigasi.

"Yang melaporkan itu banyak, tapi karena yang melaporkan itu para petani kita dan mereka susah memberikan laporan secara persyaratan formal materilnya tidak bisa dipenuhi, jadi membuat kami harus aktif untuk melakukan investigasi tersebut," katanya.

Sementara itu, Mentan Syahrul mengatakan masalah pupuk subsidi menjadi hal penting. Sebab, kata dia, pupuk berkaitan dengan produksi

pangan, terutama padi. "Kita menghadapi climate change, El Nino, menghadapi krisis pangan dunia. Oleh karena itu, masalah pupuk menjadi salah satu sandaran kita agar bisa berjalan lebih masif, lebih tepat, dan lebih akurat di lapangan," imbuh Syahrul.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo di tempat yang sama optimistis workshop yang digelar bersama Ombudsman dan PT Pupuk Indonesia dapat memperbaiki implementasi kebijakan pupuk bersubsidi menjadi lebih baik, cepat dan akurat.

"Ini tentu kita berharap menemukan sistem yang lebih akurat. Dengan demikian dari jauh-jauh hari kita sudah tahu seberapa besar orang-orang di setiap daerah yang harus tersentuh pupuk subsidi," ujar dia lagi.

Dia mengingatkan, tidak semua petani berhak memperoleh pupuk bersubsidi, melainkan ada kriteria dan sejumlah persyaratan tertentu.

"Pupuk itu penting dalam meningkatkan produktivitas pertanian. Akses petani terhadap pupuk jangan sampai dibikin rumit," ungkapnya dikutip dari laman kementan.

Ia menyebutkan, pembenahan distribusi pupuk perlu dilakukan dengan cepat. Dia juga menginginkan standar operasional prosedur (SOP) diperkuat sehingga mekanisme distribusinya bisa lebih baik. "Mari kita perbaiki SOP sehingga akses pupuk bisa lebih merata. Ingat di sini ada kepentingan petani," ungkapnya dalam siaran pers.

Syahrul juga menjelaskan, digitalisasi sangat penting dalam pengawasan dan pendataan penerima pupuk, terutama dalam meningkatkan efektivitas distribusi pupuk. "Sekarang ini zamannya digital. Seharusnya kita bisa memanfaatkan sehingga pupuk subsidi bisa diterima sesuai sasarannya," sebutnya.

Terkait transformasi kebijakan

subsidi pupuk, SYL mengingatkan semua pihak untuk berhati-hati. "Kita harus pelan-pelan. Mengurusi pertanian tidak semudah itu. Apalagi ini nasib petani. Kita tidak boleh main-main," tegasnya.

Syahrul juga mengingatkan, banyak pihak yang terlibat dalam distribusi pupuk sehingga kerja tim harus dikedepankan. "Semua pihak yang terlibat harus memiliki team work. Kita harus menjaga akuntabilitas dengan menggunakan cara-cara yang cepat, cermat, dan akurat," jelasnya. (lut/dya)



Permasalahan pokok dalam kebijakan pupuk bersubsidi berdasarkan hasil kajian dan investigasi, Transformasi Kebijakan Pupuk Bersubsidi,"

BOBBY HAMZAR RAFINUS

Wakil Ketua Ombudsman RI



Rekrutmen CASN 2023 Segera Dibuka, Ini Formasinya



Foto ilustrasi cpns/casn

JAKARTA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemendagri) telah menetapkan sebanyak 572.496 formasi aparatur sipil negara alias ASN nasional pada tahun 2023. Jumlah tersebut akan didistribusikan untuk 72 instansi pemerintah pusat sebanyak 78.862 orang dan pemerintah daerah 493.634 orang.

"Semoga proses seleksi berjalan lancar. Kami menjamin semuanya fair, tidak bisa titip-menitip," kata Menpan RB Abdullah Azwar Anas dalam keterangan resminya pada Kamis (3/8/2023).

Adapun alokasi formasi CASN instansi pusat 78.861, dari jumlah kebutuhan sebanyak 81.119. Jumlah formasi 78.861 itu dibagi untuk formasi CPNS 2023 pusat sebanyak 18.830, dari kebutuhan 34.453. Formasi PPPK 2023 instansi pusat ditetapkan sebanyak 47.493, dari kebutuhan sebanyak 46.666. Dengan demikian, jumlah formasi PPPK 2023 instansi pusat lebih banyak dibanding jumlah kebutuhan.

Daftarnya Formasi PPPK 2023 Pemda Perlu diketahui, bahwa instansi daerah atau pemda pada seleksi CASN 2023 hanya diberi kesempatan membuka lowongan PPPK. Nah, jumlah formasi PPPK 2023 instansi daerah 493.613, dari kebutuhan yang mencapai 943.373. Selisihnya lumayan banyak.

Para guru honorer yang hingga saat ini belum menjadi ASN, kemungkinan kecewa melihat formasi

PPPK Guru 2023 yang sudah ditetapkan ini. Pasalnya, jumlah formasi PPPK Guru 2023 instansi daerah hanya 296.084, dari kebutuhan yang mencapai 580.202.

Begitu juga untuk formasi PPPK Tenaga Kesehatan 2023, yang jumlahnya jauh di bawah kebutuhan. Dari tabel terlihat bahwa formasi PPPK Nakes 2023 untuk instansi daerah hanya 154.672, dari kebutuhan 327.542 orang. Adapun, formasi PPPK Tenaga Teknis 2023 untuk instansi daerah ditetapkan sebanyak 42.857, dari kebutuhan 35.629.

Dengan kata lain, jumlah formasi PPPK Teknis 2023 lebih banyak dari kebutuhan. Khusus lulusan Sekolah Kedinasan, dijatah formasi sebanyak 6.259. MenPAN-RB Azwar Anas diagendakan menyerahkan formasi CASN 2023 dan formasi PPPK 2023 yang sudah ditetapkan itu kepada 525 kepala daerah se-Indonesia dalam rapat koordinasi persiapan pengadaan CASN 2023 di Jakarta pada Kamis (3/8/2023).

Formasi yang sudah ditetapkan selanjutnya akan dilakukan verifikasi dan validasi oleh masing-masing instansi. Begitu data formasi sudah klar, barulah formasi yang dibutuhkan dimasukkan ke SSCASN BKN. Selanjutnya dibuka pendaftaran CASN 2023 dan PPPK 2023. "Proses seleksi akan dimulai pada September 2023," ujar Anas.

Dia berharap, ASN yang terpilih bisa berkinerja baik sehingga berdampak positif yang dirasakan

masyarakat, sesuai arahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Lebih jauh, dia mengatakan ada sejumlah arah kebijakan rekrutmen ASN 2023. Pertama, fokus pada pelayanan dasar dengan guru dan tenaga kesehatan menjadi formasi yang paling banyak disediakan. "Hampir 80 persen formasi 2023 untuk guru dan tenaga kesehatan," kata Anas.

Kedua, memberi kesempatan rekrutmen untuk talenta digital dan data scientist. Sedangkan ketiga, mengurangi rekrutmen pada formasi yang akan berdampak transformasi digital.

Anas melanjutkan, rekrutmen ASN juga sebagai upaya untuk menyelesaikan penataan tenaga non-ASN atau honorer. Adapun jumlah tenaga honorer mencapai 2,3 juta dan saat ini tengah dalam proses audit BPKP bersama BKN.

Pemerintah, kata dia, secara konsisten memberikan afirmasi dan menunjukkan keberpihakan untuk tenaga honorer dan eks THK-II karena mereka telah mengabdikan. "Maka rekrutmen ASN 2023 ini, sebanyak 80 persen di antaranya untuk pelamar dari tenaga non-ASN, dan 20 persen untuk pelamar umum," ungkap Anas.

Pemerintah belum merilis jadwal pendaftaran CASN 2023 secara resmi. Namun, menurut Anas, pihaknya akan mulai menyusun kebutuhan formasi dan mengusulkan ke Kementerian Keuangan (Kemendagri) pada September 2023 mendatang. Pasalnya, berbagai

instansi masih menghitung jumlah keperluan pegawai baru. Sehingga, seleksi CASN 2023 diperkirakan akan berlangsung sejak September 2023 atau lebih.

"September ini mulai kita tetapkan dulu formasinya. Sudah kami usulkan ke Kementerian Keuangan. Sudah saya sampaikan ke kementerian dan lembaga juga," kata Anas. (lut/dya)



BERIKUT DAFTAR JURUSAN YANG DIPREDIKSI AKAN BANYAK DICARI SAAT REKRUTMEN CASN 2023:

1. JURUSAN POLITIK DAN PEMERINTAHAN :

Jurusan Politik dan Pemerintahan memiliki prospek cerah untuk menjadi PNS. Contohnya pada rekrutmen CPNS 2021 oleh Pemda DIY, jurusan ini dibutuhkan untuk posisi Ahli Pertama dan Terampil.

2. JURUSAN PENDIDIKAN :

Terdapat banyak peluang untuk lulusan jurusan pendidikan, baik pada seleksi CPNS maupun PPPK. Beberapa jurusan yang sangat dicari antara lain PG PAUD, Sejarah dan Olahraga.

3. JURUSAN KESEHATAN :

Jurusan Kesehatan adalah salah satu bidang yang sangat dicari saat rekrutmen CPNS 2021.

4. JURUSAN HUKUM:

Jurusan Hukum juga memiliki banyak formasi, seperti pada Kejaksaan Agung atau Analisis Rancangan Naskah Perjanjian. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemendikham) adalah salah satu kementerian yang menyediakan banyak formasi untuk jurusan ini.

5. JURUSAN MANAJEMEN :

Pemda dan kementerian juga membutuhkan lulusan dari jurusan Manajemen. Jika Anda adalah lulusan manajemen yang berminat menjadi PNS, ini adalah kesempatan Anda.

6. JURUSAN TEKNIK :

Beberapa bidang dalam jurusan teknik yang akan sangat dicari selama rekrutmen CPNS 2023 antara lain Teknik Informatika, Teknik Elektro, Teknik Mesin, Teknik Sipil, Arsitektur, dan Teknik Informasi.

7. JURUSAN BAHASA INGGRIS :

Lulusan Bahasa Inggris memiliki prospek kerja yang baik dalam pemerintahan. Hampir semua kementerian, dinas, pemerintah pusat maupun daerah membutuhkan lulusan ini.

8. JURUSAN EKONOMI :

Jurusan Ekonomi menjadi salah satu jurusan yang paling banyak dicari saat rekrutmen CPNS. Hampir semua sektor pemerintahan membutuhkan lulusan jurusan ini.

9. JURUSAN PSIKOLOGI :

Jurusan Psikologi memiliki prospek menjadi PNS dengan posisi yang sangat beragam. Beberapa formasi yang tersedia antara lain Asesor Sumber Daya Manusia, Aparatur, dan Analisis Pengembangan Kompetensi.

10. JURUSAN AKUNTANSI :

Sama seperti jurusan Ekonomi dan Manajemen, Jurusan Akuntansi juga merupakan jurusan yang banyak dicari selama rekrutmen CPNS.

A portrait of Luna Maya with long, dark hair styled in intricate braids. She is wearing a dark, possibly black, garment with a subtle pattern. The background is a soft, neutral grey.

LUNA MAYA

**Dirias selama 4 Jam Hingga Bermain
dengan Ratusan Ekor Ular**

Foto-foto : Instagram @lunamaya



hingga marah banget. Untuk membedakan itu, lama banget take-nya. Sampai napas saya susah. Kadang suka lupa dari perut. Jadi kalau take, mana jahe panasnya," ujar Luna.

Dalam film Suzzanna: Malam Jumat Kliwon, Luna mengakui mengalami beberapa kesulitan, salah satunya menirukan cara tertawa Suzzanna. Luna Maya juga harus bisa membedakan beberapa tipe tertawa khas mendiang Suzzanna.

"Ada tertawa marah, puas, super puas, hingga marah banget. Untuk membedakan itu, lama banget take-nya. Sampai napas saya susah. Kadang suka lupa dari perut. Jadi kalau take, mana jahe panasnya," ujar Luna.

Luna Maya menyimpan suara tawa Suzzanna di gawainya dan mendengarkannya sesekali di waktu senggang.

Selain suara tertawa, Luna juga harus beradegan singkat dengan ratusan ekor ular dalam film tersebut.

Luna merasa sulit lantaran dia memang seorang yang punya ketakutan sendiri terhadap ular. Luna Maya yang memiliki fobia ular justru harus beradegan dengan hewan melata itu.

"Aduh, Pak Sunil (produser) jahat banget. Saya bacanya kecoak. Seribu ekor. Ayo kecoaknya mana. Ternyata yang muncul ular," kata Luna dalam

konferensi pers di kawasan Senayan, Jakarta Selatan, Sabtu (29/7/2023).

Luna mengatakan syuting dengan ular itu memakan waktu dua hari.

"Enggak mengancam jiwa, tapi ular itu mengancam saya. Harusnya scene pendek, malah jadi dua hari," lanjut Luna.

Produser film Suzzanna: Malam Jumat Kliwon, Sunil Soraya, memastikan bahwa adegan ular dalam film tersebut bukanlah efek CGI.

Ada empat karung yang berisi total 500 ekor ular yang dibawa ke lokasi syuting.

"Film kami tidak pakai CGI, kecuali clean up. Film kami belum pernah pakai CGI, saya pastikan. Saya belum siap kecoak. Saya siap 500 ular," ujar Sunil.

Sutradara Guntur Soeharjanto mengatakan Luna Maya butuh waktu lama untuk bisa beradaptasi dengan ular. Sebagai informasi, Suzzanna: Malam Jumat Kliwon siap tayang di bioskop pada 3 Agustus 2023.

Film ini dibintangi oleh Luna Maya sebagai Suzzanna, Opie Kumis sebagai petugas hansip, Adi Bing Slamet sebagai petugas hansip, Tyo Pakusadewo sebagai suami Suzzanna, Sally Marcelina sebagai Minarti, Taskya Namya sebagai Ratih, Achmad Megantara sebagai Surya dan Ence Bagus sebagai tukang bakso (Kompas)

AKTRIS Luna Maya menceritakan pengalamannya saat syuting film Suzzanna: Malam Jumat Kliwon.

Untuk menjadi karakter Suzzanna, Luna Maya membutuhkan waktu 4 jam didandani.

"Ritualnya berbeda dengan film pertama, sebenarnya. Kalau di film ini, saya hanya duduk 4 jam, untuk di-*makeup*. Itu setiap kali syuting," kata Luna Maya dalam konferensi pers di kawasan Senayan, Jakarta Selatan, Sabtu (29/7/2023).

Ketika membintangi Suzzanna: Beranak dalam Kubur (2018), Luna Maya berziarah ke makam Suzzanna di daerah Magelang, Jawa Tengah.

"Kalau film pertama, kita permissi, sempat ke makam Bunda ke magelang. Sempat mencoba untuk meditasi dan mandi, berendam di tempat Bunda biasa melakukan meditasi," jelas Luna Maya.

Aktris berusia 39 tahun itu ingin terlihat semirip mungkin dengan Suzzanna dalam film terbarunya.

"Sebenarnya bukan mendalami karakter Suzzanna, tapi mendalami cerita ini. Ini sesuatu yang baru. Karena ini bukan biografi. Kita berimajinasi beliau masih ada dan main film lagi. Itu yang menurutku masalah buatku," ucap Luna Maya.

"Ini ke mana arahnya. Aku harus ikuti ke mana. Akhirnya aku sama Pak Sunil, sepakat kita tetap pakai klasiknya Suzzanna kalau berakting. Jadi aku lihat film Suzzanna, misalnya dia akting marah, kesal, jahil," lanjutnya.

Luna Maya juga harus bisa membedakan beberapa tipe tertawa khas mendiang Suzzanna.

"Tapi di film ini ada ekskalasi. Ada tertawa marah, puas, super puas,

CUPLIKAN FILM SUZZANNA: MAMAM JUMAT KLIWON.



WASPADAI GEJALA RHABDOMIOLISIS AKIBAT OLAHRAGA BERLEBIHAN

AKTIVITAS fisik atau olahraga rutin merupakan salah satu gaya hidup sehat untuk menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh, namun, olahraga yang baik adalah olahraga yang disesuaikan dengan kemampuan tubuh.

Terlalu banyak berolahraga bisa menyebabkan seseorang terkena, rhabdomyolisis, yaitu suatu kondisi ketika otot mengalami kerusakan yang membuat zat-zat dalam otot masuk ke dalam aliran darah.

Pemula yang memaksakan berolahraga melampaui batas tubuhnya tanpa bimbingan atau atlet yang berlatih terlalu sering tanpa istirahat berisiko tinggi mengalami rhabdomyolisis atau rhabdo, seperti diberitakan.

Pakar kedokteran olahraga Profesor William Roberts menjelaskan ketika berolahraga, otot melepaskan zat yang disebut kreatine kinase ke dalam aliran darah.

Tetapi proses pelepasan tersebut dapat berbahaya jika otot juga melepaskan zat lain seperti kalium atau mioglobin, yang dapat menyebabkan komplikasi.

"Hampir semua orang yang berolahraga untuk meningkatkan performa akan melepaskan atau membocorkan beberapa kreatin kinase ke dalam aliran darah. Ini menjadi masalah ketika sel otot melepaskan kandungan lain seperti kalium atau mioglobin, yang menyebabkan komplikasi," kata Roberts.

Kandungan mioglobin berlebihan dalam aliran darah dapat mem-bahayakan ginjal karena dapat menyebabkan penyakit gagal ginjal.

Selain itu, kandungan zat dalam otot yang masuk ke aliran darah dapat menghambat proses pembekuan yang menyebabkan pendarahan spontan.

Salah satu gejala umum rhabdomyolisis adalah pembengkakan otot, yang terjadi karena pelepasan mioglobin dan kalium dari otot yang rusak ke dalam aliran darah.

Warna urine yang berubah gelap juga menjadi gejala rhabdomyolisis karena tingginya kadar mioglobin, yang merupakan protein berpigmen merah, dilepaskan dari otot yang rusak ke dalam darah dan akhirnya diekskresikan dalam urine.

Gejala lainnya adalah nyeri otot karena rhabdomyolisis dapat menyebabkan inflamasi dan kematian sel otot yang signifikan. Nyeri otot terjadi setelah latihan intens karena kerusakan otot ringan.

Oleh karena itu penting untuk menyesuaikan dengan kemampuan tubuh

ketika berolahraga agar tetap mendapatkan tubuh yang sehat dan bugar sekaligus menjaga otot dari kerusakan.

Jangan berlebihan

Sementara itu, dokter dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Olahraga (PDSKO) dr. Michael Triangto, Sp.KO tidak menganjurkan masyarakat untuk melakukan olahraga secara berlebihan karena dapat menimbulkan risiko berbahaya bagi jantung.

Michael menjelaskan bahwa olahraga berat yang dilakukan berlebihan dapat menghasilkan suatu radikal bebas, yang dalam batas tertentu menjadi tidak baik bagi tubuh sendiri, termasuk membahayakan jantung.

"Dengan demikian, hal ini (olahraga berlebihan) dapat menimbulkan radikal bebas yang sangat berlebihan yang dampaknya malah merusak jantung," kata Michael saat di Jakarta.

Michael mengatakan olahraga yang baik untuk kesehatan jantung sebetulnya olahraga yang bersifat kardio atau aerobik yang dilakukan dengan gerakan berulang-ulang, intensitas ringan, dan waktu melakukannya panjang atau berkelanjutan.

Jenis olahraga kardio di antaranya termasuk berjalan kaki, bersepeda, berenang, naik gunung, jogging atau lari santai, hingga berlari dalam intensitas biasa atau sedang.

Sementara itu, ada pula lari jarak jauh atau lari maraton, yang walaupun dapat bermanfaat untuk kesehatan jantung, namun berisiko menimbulkan masalah apabila tidak dilakukan secara tepat.

Michael juga menyoroti kasus kematian mendadak yang terjadi dalam lomba-lomba lari maraton, jenis olahraga yang termasuk dalam kategori berat. (Ant)



Dengan demikian, hal ini (olahraga berlebihan) dapat menimbulkan radikal bebas yang sangat berlebihan yang dampaknya malah merusak jantung,"

dr. Michael Triangto, Sp.KO

Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Olahraga (PDSKO)



APPLE MELARANG PERGANTIAN NAMA TWITTER JADI 'X'

REBRANDING Twitter menjadi X agaknya menjadi hal yang sulit terjadi di toko aplikasi milik Apple, App Store.

Pemilik Twitter Elon Musk resmi mengganti nama dan logo Twitter menjadi X pada Minggu (23/7/2023).

Tak cuma nama dan logonya yang berubah menjadi X, sebutan 'Tweet' pun kini diubah menjadi Post.

Proses rebranding dari Twitter menjadi X sudah terjadi di tampilan aplikasi via desktop dan smartphone Android.

Hanya saja, pergantian nama Twitter menjadi X mengalami ganjalan di ponsel dengan sistem operasi iOS alias produk keluaran Apple.

Apple tak mengizinkan jenama Twitter diganti menjadi X di toko aplikasi mereka, App Store.

Hal itu disebabkan oleh aturan App Store yang mengharuskan pembuat aplikasi untuk memberi nama lebih dari satu karakter. Aturan itu diketahui telah lama dibuat oleh Apple.

Meski logo aplikasi tersebut telah menjadi X di App Store, namun nama aplikasi tetap Twitter dan tak bisa diganti dengan satu huruf saja.

Pengguna perangkat Apple akan melihat di dalam deskripsi aplikasi nama yang ditampilkan telah berubah menjadi X.

Akan tetapi saat mencari aplikasi terkait, yang dimunculkan adalah aplikasi bernama Twitter.

App Store mengizinkan aplikasi diberi nama sepanjang 30 karakter, namun batas minimum karakternya adalah dua.

Hal itu berbeda dengan Google Playstore di Android. Rebranding Twitter menjadi X mulus-mulus saja karena tak ada aturan jumlah karakter.

Pengguna di Android sudah bisa meng-unduh aplikasi X di Playstore yang merupakan pengganti dari Twitter.

Sebelumnya perubahan nama dari Twitter menjadi X ini sempat menimbulkan masalah di Indonesia. Pasalnya situs X.com masuk dalam daftar situs yang diblokir.

Namun kini blokir tersebut menurut Kominfo sudah dibuka, dan saat pengguna mengakses X.com akan diarahkan ke situs Twitter.

Ketika itu Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Dirjen Aptika) Kementerian Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan, bahwa X.com pernah dipakai untuk situs lainnya yang mana itu tidak sesuai dengan peraturan di Indonesia.

"(Makanya) masuk dalam list blokir Kominfo," ujar Semuel kepada beberapa waktu lalu.

Lebih lanjut, kata pria yang disapa Semmy ini, Kominfo telah berkoordinasi dengan pihak Twitter di Indonesia, dan mereka menjanjikan akan mengirimkan pemberitahuan bahwasanya X.com akan digunakan oleh Twitter.

"Begitu menerima pemberitahuan tersebut, kami akan melakukan normalisasi," ucapnya.

Seperti diketahui Elon Musk telah merombak logo ikonik burung Twitter secara radikal menjadi X. Latar belakang logo yang sebelumnya berwarna biru, kini menjadi hitam.

CEO Twitter Linda Yaccarino menjelaskan gagasan di balik perubahan menjadi X. Menurutnya X akan melangkah lebih jauh yang akan mengubah alun-alun kota global.

"X adalah keadaan masa depan dari interaktivitas tanpa batas - berpusat pada audio, video, pemesanan, pembayaran/perbankan - menciptakan pasar global untuk ide, barang, layanan, dan peluang. Didukung oleh AI, X akan menghubungkan kita semua dengan cara yang baru mulai kita bayangkan," papar Linda di akun Twitternya (berbagai sumber)

HARIAN

LENTERAInspirasi Perubahan **TODAY**

HARIAN "LENTERA TODAY"

PIMPINAN PERUSAHAAN TARMUJI TALMACSI

OMBUDSMAN SUKARJITO (ID Sertifikasi 14319)

PENANGGUNG JAWAB ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)

PIMPINAN REDAKSI ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)

REDAKTUR PELAKSANA AGUSTINA WIDYAWATI (ID Sertifikasi 2567)

MEDIA TERVERIFIKASI

BIRO: SURABAYA: LUTFI YUHANDI | **MOJOKERTO:** RAHMAD SURYADI | **GRESIK-LAMONGAN:** ASEPTA YOGA P (ID SERTIFIKASI 3189) | **KEDIRI-JOMBANG-NGANJUK:** GATOT SUNARNO | **TAPAL KUDA (PASURUAN-PROBOLINGGO BONDOWOSO- SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI):** IMAN SANTOSO, | **MADIUN:** IMAM GHOZALI (ID SERTIFIKASI 11563), | **BLITAR:** ARIEF SUKAPUTRA | **TRENGGALEK:** ANGGA PRAYOGA

PENASEHAT HUKUM DR. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH | **MARKETING COMMUNICATION** JOKO PRASETYO | **SEKERTARIS** ISTIDHA NUR AMANAH,

DESAIN GRAFIS PAULUS IVAN, KIKI AMALIA GUYEN | **ALAMAT REDAKSI** JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26 | **TELP** 03187854491 | **PENERBIT** PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA | **ALAMAT PERCETAKAN** SMILE GRAFIKA JL. RAYA KALIRUNGKUT 42 SURABAYA | **TELP IKLAN** 031-87854491 | **NIB** 91205006801134 | **HARGA IKLAN** RP 25.000 MM/KOLOM

Wartawan Lentera Today dalam setiap bertugas dilengkapi dengan tanda pengenalan wartawan/kartu pers yang dikeluarkan perusahaan secara sah. Nama pemegang tanda pengenalan wartawan/kartu pers Lentera Today tercantum di Box Redaksi. Siapa pun yang mengaku/mengatasnamakan Lentera Today, tanpa bisa menunjukkan surat/kartu tanda pengenalan atau namanya tidak tercantum dalam Kotak Redaksi, agar ditolak/ dikonfirmasi/dilaporkan ke manajemen redaksi/perusahaan atau melalui nomor telepon yang tertera di Kotak Redaksi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, setiap wartawan Lentera Today dilarang menerima dan/atau meminta apa pun dengan alasan apa pun.

WAJIB REKAM MEDIS ELEKTRONIK AKHIR TAHUN 2023

MAXQUAD mendukung digitalisasi kesehatan usai pemerintah mewajibkan seluruh fasilitas kesehatan (faskes) di Indonesia menggunakan rekam medis elektronik pada akhir 2023.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) No. 24/2022 tentang Rekam Medis menyebutkan bahwa rumah sakit umum dan swasta dari berbagai tipe, klinik, praktek dokter mandiri, dan laboratorium, diwajibkan untuk beralih dari sistem pencatatan riwayat medis pasien yang manual menjadi sistem elektronik pada 31 Desember 2023.

Rekam medis elektronik (Electronic Medical Record/EMR) adalah sistem elektronik yang menyimpan seluruh data kesehatan pasien mulai dari identitas, riwayat pemeriksaan, tindakan, obat-obatan, dan pelayanan kesehatan lainnya.

Nantinya, sistem tersebut akan mengumpulkan seluruh data medis pasien, termasuk riwayat kesehatan, diagnosa, hasil tes laboratorium, resep obat, serta informasi lainnya yang relevan, dan menyimpannya dalam format yang dapat diakses secara elektronik oleh tenaga medis yang berwenang.

Advisor Maxquad Almira Shinantya menuturkan perusahaan selalu memastikan

implementasi sistem EMR selaras dengan perkembangan regulasi pemerintah.

"Pentingnya EMR dalam mendapatkan layanan kesehatan yang bermutu di berbagai fasilitas pelayanan kesehatan mendorong kehadiran MaxQuad sebagai enabler faskes dalam pe-nerapan EMR," ujar-nya dalam siaran pers, Sabtu (29/7/2023)

Penerapan Max-Quad EMR bagi faskes di Indo-nesia memberi-kan manfaat berkelanjutan.

Pertama, memberikan akses instan bagi para profesional kesehatan untuk mengakses informasi medis pasien, memfasilitasi koordinasi perawatan dan respons cepat terhadap kondisi pasien.

Kedua, MaxQuad EMR terintegrasi dengan BPJS Kesehatan V-Claim dan E-Claim serta INA CBGs, yang digunakan untuk sistem pembiayaan rumah sakit dan asuransi kesehatan.

Selain

itu, sistem MaxQuad EMR juga terhubung dengan berbagai sistem lain seperti Sistem In-formasi Manajemen Rumah Sakit dan Klinik (SIM-RS & SIM-K), Sistem Informasi Laboratorium, Sistem Informasi Radiologi, Sistem Rujukan Terintegrasi Nasional (SISRUTE Nas), dan sebagainya.

MaxQuad merancang EMR yang terintegrasi dengan SATU SEHAT, program pemerintah untuk menciptakan sistem informasi kesehatan terpadu di seluruh Indonesia.

Hal ini mening-katkan layanan kesehatan yang lebih baik dan efisien, mening-katkan ke-selamatan pasien, dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan kesehatan.

Integrasi MaxQuad EMR dengan SATU SEHAT memberi kemudahan bagi manajemen faskes dalam

mengikuti kebijakan pemerintah serta memudahkan masyarakat mengakses seluruh riwayat kesehatan.

Aturan soal rekam medis elektronik merupakan kerangka regulasi pendukung dari implementasi transformasi teknologi kesehatan.

Transformasi ini menjadi bagian dari pilar ke-6 Transformasi Kesehatan. Kebijakan ini hadir sebagai pembaharuan dari aturan sebelumnya yaitu PMK nomor 269 tahun 2008 yang dimutakhirkan menyesuaikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan pelayanan, kebijakan dan hukum di masyarakat.

Sistem rekam medis elektronik itu sangat penting. Bisa digunakan untuk pemantauan kesehatan masyarakat. Karena bisa mengetahui riwayat kesehatan seseorang.

Data tersebut bisa untuk pencegahan atau peringatan dini atas kasus kesehatan tertentu. Termasuk juga berfungsi untuk menekan kematian ibu hamil dan bayi baru lahir.

Data ibu hamil akan direkam setiap kali dia kontrol kesehatan. Penerapan rekam medis elektronik juga wajib dijalankan dari tingkat puskesmas-puskesmas.

Namun dibalik itu sosialisasi tentang sistem rekam medis elektronik harus dijalankan dengan baik. Supaya para tenaga kesehatan, termasuk layanan fasilitas kesehatan bisa menjalankannya dengan baik.

Soal kepastian apakah rekam medis elektronik apakah benar-benar dijalankan per 31 Desember 2023 atau diperpanjang, merupakan kewenangan pemerintah (berbagai sumber)

Sejak Februari (dari hal 1)

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) merampungkan pemeriksaan terhadap Plt Direktur Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI Faisal dalam kasus dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial (bansos) beras, Selasa (1/8/2023). Faisal diperiksa sebagai saksi dan didalami perihal data riil penerima bansos.

"Saksi didalam pengetahuan antara lain terkait dengan pelaporan para pendamping dari Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2020 sampai dengan 2021 pada Kemensos dalam rangka mencocokkan data riil dari para penerima bansos," ujar Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Kamis (3/8/2023).

Materi itu juga didalami lewat saksi Keukeu Komarawati dan Irwan Prabowo selaku PNS Direktorat Jaminan Sosial Kementerian Sosial. Hingga berita ini dibuat, belum ada keterangan resmi dari Faisal terkait pemeriksaan tersebut.

Kasus ini diusut KPK sejak bulan Februari lalu. Sudah ada tersangka yang ditetapkan oleh KPK tetapi belum diumumkan secara resmi ke publik.

Meski demikian, ada beberapa nama yang telah dicegah KPK bergian ke luar negeri selama enam bulan terhitung mulai 10 Februari 2023 sampai dengan 10 Agustus 2023. Pencegahan tersebut dapat dipertanggungjawabkan apabila diperlukan.

Mereka ialah mantan Direktur Utama TransJakarta dan Direktur Utama BGR Logistic Kuncoro Wibowo, Ketua Tim Penasihat PT Primalayan Teknologi Persada (PTP) Ivo Wongkaren, Direktur Komersial PT BGR Budi Susanto. Kemudian VP Operation PT BGR April Churniawan, Ketua Tim Penasihat PTP Roni Ramdani dan GM PTP Richard Cahyanto.

Para tersangka dinilai melanggar Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Dalam proses penyidikan berjalan, KPK sudah memeriksa puluhan saksi dan melakukan pengeledahan, dua di antaranya rumah Kuncoro dan apartemen Budi Susanto.

Kementerian Sosial (Kemensos) RI sendiri menegaskan akan kooperatif dalam mengikuti proses hukum terkait pemeriksaan sejumlah pegawai oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perihal bantuan sosial (bansos) beras.

Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos, Robben Rico di Jakarta, juga menekankan bahwa pihaknya akan membantu KPK agar kasus korupsi bansos beras dapat selesai. "Kita mengikuti proses hukumnya. Artinya, teman-teman kemarin yang dipanggil kita arahkan saja. (Kita) sampaikan apa adanya," ujar Robben pada awak media.

Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, yang membawahi sejumlah pegawai yang terlibat kasus korupsi itu mengatakan bahwa pegawai yang menjadi borok Kemensos telah dimutasi dan tidak berkantor di pusat. "Jadi yang

dipanggil di situ kan sekarang yang sesuai jabatannya."

Seperti yang diberitakan sebelumnya, KPK telah melakukan pengeledahan di kantor Kemensos. Pengeledahan itu dilakukan terkait dengan dugaan kasus korupsi bansos beras. Kemensos mengungkapkan sejumlah dokumen dan gawai dibawa KPK dari pengeledahan tersebut. KPK mengeledah gedung Kementerian Sosial untuk melengkapi alat bukti terkait dugaan korupsi bansos beras.

Pihak Kemensos menjelaskan pengeledahan berlangsung sekitar 8 jam. Tim penyidik KPK datang mulai jam 10.00 hingga 18.00 WIB. Tak ada pihak yang dibawa penyidik KPK. Ruang yang digeledah pun tidak disegel KPK.

Tim penyidik KPK sempat menemui Menteri Sosial Tri Rismaharini. Namun, saat tim KPK tiba di Kemensos, Risma saat itu sedang rapat. Kemudian penyidik KPK diantarkan ke ruangan yang akan digeledah. Sebagai catatan, pada 2020, Kemensos masih dipimpin oleh Juliari Batubara, yang mendepak di penjara akibat kasus bantuan Covid-19. Baru kemudian, Risma dilantik tepatnya pada 23 Desember 2020.

Diketahui, pada sidang pembacaan putusan Senin (23/8/2021), majelis hakim menghukum Juliari dengan penjara selama 12 tahun. Vonis ini lebih tinggi satu tahun dari tuntutan jaksa KPK. Juliari juga dihukum membayar denda sebesar Rp500 juta dan uang pengganti sebanyak Rp14,5 miliar. Dia juga divonis tidak boleh menggunakan hak politik selama empat tahun. Namun dalam salah satu pertimbangannya, majelis hakim menganggap cacian publik terhadapnya patut meringankan hukuman Juliari.

Ruangan Kemensos yang digeledah KPK ruang Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial atau Ditjen Dayasos. Pihak Kemensos tak menjelaskan secara detail berapa ruangan yang digeledah KPK. Kemensos menyerahkan sejumlah dokumen terkait kasus dugaan korupsi bansos beras.

BPS: Bansos Jokowi Kurangi Kemiskinan

Di sisi lain, Angka kemiskinan di Indonesia masih tinggi. Hingga Maret 2023, jumlah penduduk miskin mencapai 25,9 juta orang atau 9,36%. Angka kemiskinan itu menurun dibandingkan dengan kondisi September 2022 dan Maret 2022.

Sekretaris Utama BPS Atqo Mardiyanto menjelaskan, angka kemiskinan Indonesia pada Maret 2023 yang mencapai 25,9 juta, lebih rendah dari tingkat kemiskinan per September 2022 yang sebesar 9,57% atau sebanyak 26,36 juta orang. Sementara pada Maret 2022 jumlah angka kemiskinan mencapai 9,54% atau 26,16 juta orang. "Beberapa catatan sosial ekonomi yang mempengaruhi kondisi kemiskinan pada bulan Maret 2023," jelas Atqo.

Hal-hal yang mempengaruhi angka kemiskinan di Indonesia turun pada Maret 2023, kata Atqo karena kondisi perekonomian nasional yang

terus membaik dari tingkat pengangguran terbuka. Juga adanya peningkatan nilai tukar petani, laju inflasi yang rendah. Dan terpenting adalah tingkat pengeluaran konsumsi rumah tangga yang relatif tinggi.

Angka kemiskinan yang menurun, kata Atqo juga tak lepas dari keberhasilan pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat melalui bantuan sosial (bansos). "Penyaluran bansos pemerintah untuk mengurangi beban masyarakat terus dilakukan, berdasarkan catatan Kemenko PMK, penyaluran PKH (Program Keluarga Harapan) tahap satu tahun 2023 telah terealisasi hampir 90%, demikian bansos sembako mencapai 86,5%, ujarnya.

Dari tingkat konsumsi masyarakat, penduduk miskin di Indonesia masih terbebani oleh mahalnya harga pangan. Seperti diketahui, harga komoditas pangan pada periode September 2022 hingga Maret 2023 naik.

Bahan pangan yang naik, yaitu beras naik 9,83%, tepung terigu naik 2,57%, cabai rawit naik 3,87%, dan ikan kembung naik 2,52%. "Perpaduan sosial ekonomi masyarakat yang membaik, penyaluran bantuan sosial, dan perkembangan harga pangan mempengaruhi kondisi kemiskinan pada Maret 2023," jelas Atqo.

Adapun garis kemiskinan pada Maret 2023 tercatat sebesar Rp 550.458 per kapita per bulan, dengan komposisi garis kemiskinan makanan sebesar Rp 408.522 atau 74,21% dan garis kemiskinan bukan makanan sebesar Rp 141.936 atau 25,79%.

Pada Maret 2023, rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,71 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, garis kemiskinan per rumah tangga secara rata-rata adalah sebesar Rp 2.492.657 per rumah tangga miskin per bulan.

Sebagai gambaran, garis kemiskinan atau batas kemiskinan adalah tingkat minimum pendapatan yang dianggap perlu untuk dipenuhi untuk memperoleh standar hidup yang mencukupi di suatu negara. Garis kemiskinan merupakan nilai rupiah yang harus dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik kebutuhan hidup minimum makanan maupun kebutuhan hidup minimum non-makanan.

Diketahui, pemerintah akan kembali menyalurkan tambahan bantuan sosial atau bansos beras 10 kg selama tiga bulan pada Oktober-Desember 2023. Adapun total anggaran bansos beras yang disiapkan sebesar Rp 8 triliun.

Pemberian bantuan sosial atau bansos dilakukan kepada masyarakat kurang mampu dengan total bantuan bansos beras 30 kg pada akhir tahun ini.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bantuan pangan atau bansos beras diberikan untuk masyarakat yang masuk kategori kelompok miskin, sebanyak 21,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

"Jadi nanti pada bulan Oktober hingga Desember kita akan menambahkan Rp 8 triliun yang akan diberikan kepada 21,3 juta keluarga

yang rentan dengan setiap kelompok mendapatkan 10 kg beras per bulan," terang Sri Mulyani, dikutip Selasa (1/8/2023). "Jadi mereka akan mendapatkan 3 bulan 30 kg, 10 kg per bulannya," ujar Sri Mulyani.

Menurut dia, tambahan bansos beras ini bertujuan untuk memperkuat ketahanan masyarakat di tingkat terbawah dari berbagai guncangan yang terjadi di sektor ekonomi. "Pemulihan ekonomi jangan sampai meninggalkan kelompok yang paling rentan. Sehingga kita melindungi dan memperkuat kelompok paling rentan, kelompok paling miskin," tutur Sri Mulyani.

Pemerintah telah merealisasikan penyaluran bantuan sosial beras sebanyak 605.000 ton atau 95 persen dari target 640.000 ton beras selama periode April hingga 23 Juni 2023. "Dengan adanya penyaluran beras murah kita harapkan akan mampu menurunkan harga beras bulan Mei sebesar 0,15 persen dibandingkan April 2023," kata Deputy II Kementerian Koordinator Bidang perekonomian Musdhalifah Machmud dalam peluncuran Gerakan Pangan Murah Bapanas.

Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa Pemerintah akan mengedepankan aksesibilitas, availabilitas harga yang terjangkau dan kualitas pangan yang baik untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri. Hal tersebut sebagai upaya dalam rangka untuk mendukung terwujudnya indeks prestasi ketahanan pangan Indonesia. (wid,rls,ist,bps/dya)

TAMBAHAN BANTUAN BERAS 2023

(Data Kementerian Keuangan, Badan Pangan Nasional, 24 Juli 2023)



Anggaran
Rp 8 triliun



Sasaran penerima
21,35 juta KPM



Penyaluran
Oktober-Desember 2023



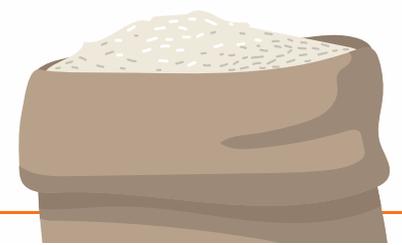
Jumlah bantuan
10kg/bulan



Stok beras untuk bantuan
640 ribu ton

CARA CEK PENERIMA BANTUAN BERAS MELALUI LAMAN :

cekbansos.kemensos.go.id



Anggaran Pemilu di KPU dan Bawaslu Komisi II DPR Dituding Dapat Duit Rp 300 Juta/Anggota



(Ilustrasi) Sosialisasi Pemilu 2024 terus dilakukan jelang Pilpres yang akan digelar pada 14 Februari 2024. (dok)

JAKARTA - Tak hanya partai politik yang makin menghangat jelang Pemilu 2024. Tapi berbagai isu juga mencuat di senayan.

Terbaru, Peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus menuding anggota Komisi II DPR RI mendapatkan sejumlah dana dari anggaran Pemilu 2024 yang ada di Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Ia mengatakan, uang diterima dari anggaran sosialisasi yang setiap titik jumlahnya mencapai Rp 300 juta untuk setiap anggota.

"Coba teman-teman kalikan saja itu sudah, Rp 300 juta satu titik, satu anggota DPR satu tahun mendapatkan 10 titik jatahnya, 10 titik kali Rp 300 juta kali 50 anggota DPR Komisi II, berapa?" ujar Lucius di Kantor Formappi, Matraman, Jakarta Timur, Kamis (3/8/2023).

Baginya, saat ini Komisi II DPR RI kehilangan marwahnya untuk melakukan pengawasan ketat pada penggunaan anggaran pemilu di KPU dan Bawaslu. "Salah satu yang membuat DPR menjadi tidak kritis terhadap penggunaan anggaran dari KPU dan Bawaslu karena mereka mendapatkan jatah yang sangat besar dari anggaran sosialisasi," ucap dia.

Lucius menganggap praktik tersebut merupakan permainan anggaran dan bisa dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Sebab, dana sosialisasi pemilu itu digunakan untuk kepentingan pribadi para anggota dewan. "Dia (anggota DPR) itu kan kampanye di dapilnya di pemilihnya. Dia tahu dia akan maju lagi. Orang-orang yang mendapatkan uang itu tidak tahu kalau uang KPU yang dibawa pulang itu. Yang dia tahu yang menyelenggarakan kegiatan ini adalah anggota DPR, sehingga amplop yang dia bawa pulang, dia berpikir itu amplop dari

anggota DPR," kata Lucius.

Sebelumnya, Lucius meminta KPU dan Bawaslu menyampaikan secara terbuka penggunaan anggaran Pemilu 2024 melalui situs web yang bisa diakses oleh masyarakat. Menurut dia, KPU dan Bawaslu tak bisa dipercaya jika tidak terbuka dalam mengungkapkan alokasi dana yang diberikan padanya. Sebab, dana Pemilu 2024 yang telah disepakati mencapai Rp 76,6 triliun.

Lucius mengatakan publik berkewajiban untuk mengetahui penggunaan anggaran Pemilu 2024 oleh KPU dan Bawaslu. Dia menyebut DPR memang mitra kerja KPU dan Bawaslu untuk melakukan pengontrolan, namun dirasa tidak cukup. "Tapi itu tidak cukup karena ini adalah dana negara, dana rakyat. Sehingga penting bagi lembaga seperti KPU dan Bawaslu untuk menyampaikan itu rutin melalui websitenya," kata Lucius.

Anggaran Melonjak, Kualitas Tak Naik

Lonjakan anggaran penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 yang diberikan kepada KPU RI maupun Bawaslu RI hingga tiga kali lipat dianggap belum efektif menghasilkan kinerja yang berkualitas. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Kaka Suminta menjelaskan, pemerintah telah menganggarkan Rp 76,6 triliun untuk KPU dan Rp 33,8 triliun untuk Bawaslu. Namun sampai pelaksanaan tahapan tengah tahun 2023 ini, belum maksimal.

Ada sejumlah tahapan yang tidak memberikan kepastian, bahkan memunculkan masalah. Contohnya pada tahapan penyusunan regulasi hingga pengembangan teknologi informasi yang digunakan dalam tahapan.

"Serta melemahnya peran dan partisipasi masyarakat sipil dalam tahapan pemilu 2024, baik akibat sempitnya ruang partisipasi, maupun karena pelamahan di masyarakat sipil sendiri," ujar Kaka.

Jika dibandingkan dengan anggaran pada Pemilu Serentak 2019 lalu, disebutkan Kaka, nilainya jauh lebih tinggi di Pemilu Serentak 2024. Tahun 2019, total anggaran yang dikeluarkan pemerintah Rp 25,59 triliun. "Peningkatan anggaran yang sekitar tiga kali lipat anggaran pemilu 2019, belum dapat memberikan gambaran terkait peningkatan kualitas pelaksanaan pemilu 2024 ini," ujarnya.

Diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan daftar pemilih tetap (DPT) untuk Pemilu 2024. Jumlahnya mencapai 204.807.222 pemilih. Berdasarkan hasil rekapitulasi DPT, mayoritas pemilih Pemilu 2024 didominasi dari kelompok generasi Z dan milenial.

"Sebanyak 66.822.389 atau 33,60% pemilih dari generasi milenial," kata Komisioner KPU RI Betty Epsilon Idroos.

Generasi milenial adalah sebutan untuk orang yang lahir pada 1980 hingga 1994. Sedangkan pemilih dari generasi Z adalah sebanyak 46.800.161 pemilih atau sebanyak 22,85% dari total DPT Pemilu 2024.

Adapun sebutan generasi Z merujuk pada orang yang lahir mulai 1995 hingga 2000-an. Jika diakumulasikan, total pemilih dari kelompok generasi milenial dan generasi Z berjumlah lebih dari 113 juta pemilih. Kedua generasi ini mendominasi pemilih Pemilu 2024, yakni sebanyak 56,45% dari total keseluruhan pemilih.

Selain itu, adapun kelompok pemilih dari generasi X yang menyusul

di urutan berikutnya yaitu sebanyak 57.486.482 atau 28,07% dari total pemilih. Generasi X adalah orang kelahiran 1965 hingga 1979.

Sisanya berasal dari kelompok generasi pre-boomer, atau orang yang lahir sebelum tahun 1944 dengan total sebanyak 3.570.850 atau 1,74% pemilih.

Betty juga menjelaskan, total 204 juta pemilu ini ditetapkan oleh KPU setelah proses merekapitulasi hasil penetapan DPT yang dilakukan seluruh KPU kabupaten/kota dan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) pada 20-21 Juni 2023. (wid,rls,ist/dya)

RINCIAN ANGGARAN PEMILU 2024

1. TAHAPAN PEMILU (TOTAL)

RP 63.405.969.628

Perencanaan program & anggaran serta penyusunan peraturan
(Rp2.820.649.566.000)

Pemutakhiran data pemilih
(Rp6.218.595.000.000)

Pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu
(Rp759.853.132.000)

Penetapan peserta pemilu
(Rp542.198.061.000)

Penetapan jumlah kursi dan penetapan dapil
(Rp530.517.815.000)

Pencalonan presiden dan wapres serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan kabupaten kota
(Rp361.007.559.000)

Masa kampanye pemilu
(Rp1.604.393.553.000)

MASA TENANG

Pemungutan dan perhitungan suara
(Rp41.306.318.400.000)

Penetapan hasil pemilu
(Rp9.262.436.542.000)

2. DUKUNGAN TAHAPAN PEMILU

RP 13.250.342.666.000

Gaji
(Rp 6.931.119.183.000)

Sarana dan Prasarana/ Operasional Perkantoran
(Rp6.319.223.483.000)

